

BAB I

PENDAHULUAN

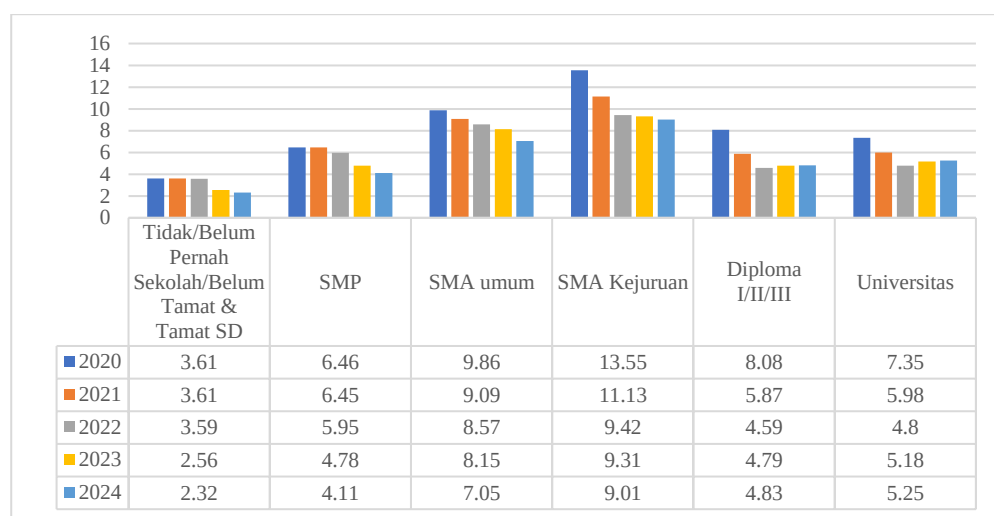
1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan ekonomi suatu negara tidak hanya bergantung pada adanya sumber daya alam, tetapi juga pada mutu sumber daya manusianya. Pendidikan yang lebih baik diharapkan menjadi aset utama dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kenyataan yang ada, muncul fenomena yang bertentangan yaitu, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kemungkinan mengalami pengangguran. Fenomena ini disebut sebagai pengangguran terdidik, atau *educated unemployment* sebuah masalah yang muncul dalam ekonomi modern, termasuk di Indonesia (Muslim, 2014)

Menurut Badan Pusat Statistik dari publikasi Statistik Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tercatat di angka 7.194.862 jiwa, dengan sebagian besar berasal dari kelompok berpendidikan menengah atas dan tinggi. Angka pengangguran di kalangan lulusan universitas mencapai sekitar 871.860 jiwa dari keseluruhan pengangguran nasional (Badan Pusat Statistik, 2024), menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya memastikan peluang kerja yang lebih baik.

Kenaikan jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Keadaan ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara *supply* dan *demand* tenaga kerja berpendidikan. Berdasarkan teori *Human Capital* yang diusulkan oleh Becker (1993), pendidikan dianggap sebagai investasi yang mampu meningkatkan

produktivitas serta pendapatan individu. Namun, teori ini hanya relevan jika pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja sesuai dengan kualifikasinya. Di Indonesia, fenomena *underemployment* dan ketidakcocokan pendidikan-pekerjaan menunjukkan bahwa pasar kerja belum dapat mengoptimalkan potensi manusia yang dihasilkan melalui pendidikan tinggi. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar berikut, yang melampirkan tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan.

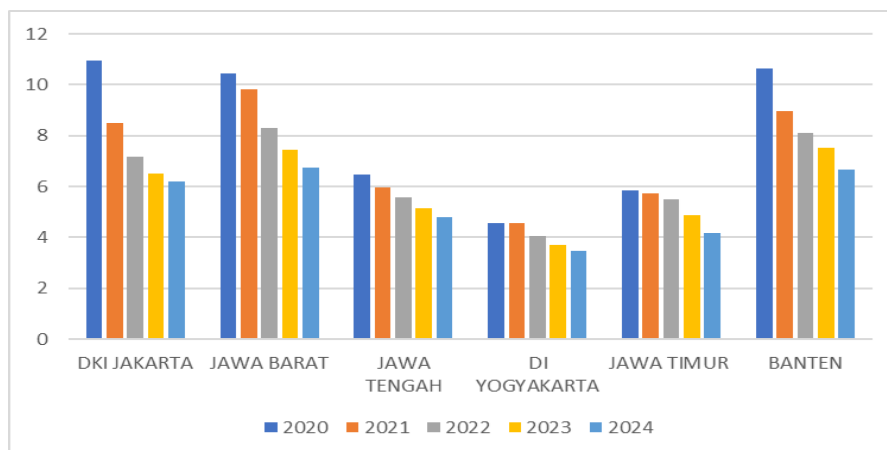


Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data, secara umum semua jenjang pendidikan menunjukkan tren penurunan, namun tingkat pengangguran lulusan menengah ke atas tetap relatif tinggi dibandingkan pendidikan dasar (Badan Pusat Statistik). Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, tidak selalu membuat tingkat pengangguran mereka semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor struktural, seperti kemampuan industri yang mempekerjakan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi masih terbatas. Di sisi lain, perubahan dalam cara industri modern merekrut pekerja yang menekankan pada kemampuan digital dan

kemampuan beradaptasi belum sepenuhnya terwujud dalam sistem pendidikan di Indonesia.



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi yang Ada di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

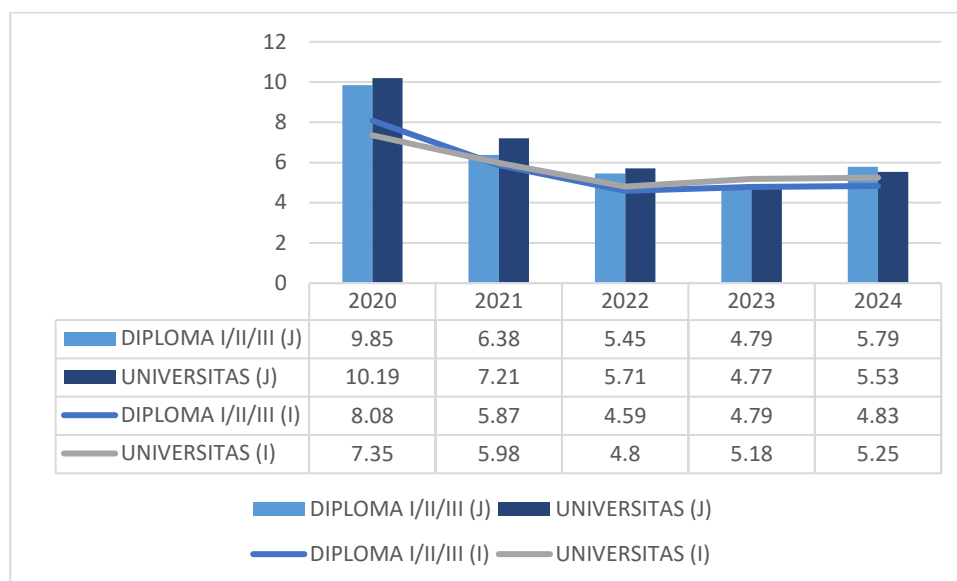
Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di seluruh provinsi di Pulau Jawa untuk periode 2020–2024. Jelas terlihat bahwa provinsi Jawa Barat dan Banten secara konsisten memiliki angka pengangguran tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Pusat Statistik). Meskipun tren penurunan secara umum telah diamati sejak pandemi, TPT di Jawa Barat tetap berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Dari perspektif regional, Jawa Barat adalah provinsi terpadat di Indonesia dan pada saat yang sama, pusat sektor manufaktur nasional. Dari kacamata ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa wilayah berbasis industri seharusnya memiliki lebih banyak lapangan kerja yang tersedia (daya serap yang tinggi). Namun, tingkat investasi dan aktivitas industri di Jawa Barat tidak berbanding lurus

dengan optimalisasi penyerapan tenaga kerja, yang mengindikasikan adanya masalah struktural serius di pasar tenaga kerja wilayah tersebut.

Secara regional, Provinsi Jawa Barat adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan juga salah satu provinsi yang menjadi pusat industri nasional. Menurut data BPS Jawa Barat tahun 2024, provinsi ini memiliki populasi sekitar 49,3 juta orang, di mana jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 26,19 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2024). Meski jumlah penduduk yang produktif cukup tinggi, penyerapan tenaga kerja masih tidak memadai. Padahal pada umumnya, wilayah yang berbasis industri seharusnya memiliki lebih banyak lapangan kerja yang tersedia misalnya pabrik. Meskipun demikian, belum menunjukkan perkembangan yang positif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan Provinsi Jawa Barat yang menjadi penyumbang jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia. Bahkan, mayoritasnya Adalah pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.

Dinamika pasar tenaga kerja di tingkat nasional juga terlihat jelas di Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini memainkan peran penting sebagai pusat industri manufaktur di Indonesia. Kondisi ini membawa tantangan struktural tersendiri. Investasi industri yang tinggi belum diiringi dengan peluang kerja yang memadai bagi tenaga kerja berpendidikan tinggi. Lulusan perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi tenaga kerja produktif, justru berkontribusi signifikan terhadap angka pengangguran. Untuk menggambarkan sejauh mana masalah ini, data pengangguran di Jawa Barat berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan di bawah ini.



Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketika menganalisis tren pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dari sudut pandang tingkat pendidikan, gambaran yang muncul menjadi semakin kompleks. Fenomena “pengangguran terdidik” (pengangguran di kalangan individu lulusan perguruan tinggi) di provinsi ini sangat kontras dengan situasi nasional. Hal ini digambarkan dalam Gambar 1.3. Grafik ini membandingkan tingkat pengangguran lulusan diploma (I/II/III) dan lulusan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Barat (grafik batang) dengan rata-rata nasional (grafik garis).

Grafik ini memberikan bukti empiris yang sangat mendukung pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai subjek studi ini. Grafik tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan tenaga kerja terpelajar di Provinsi Jawa Barat secara konsisten berada di atas rata-rata nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 10%, jauh lebih tinggi

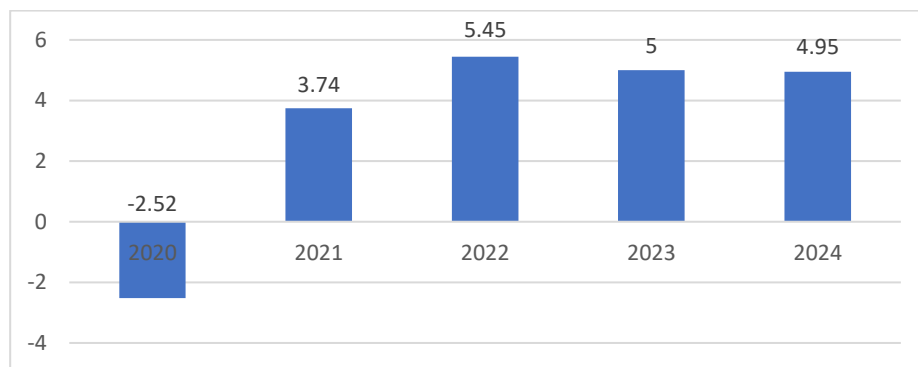
daripada rata-rata nasional yang sekitar 7,35%. Meskipun tren penurunan terlihat seiring berjalannya waktu, tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di provinsi ini tetap berada di atas rata-rata nasional bahkan pada akhir periode pengamatan pada tahun 2024.

Angka-angka ini mencerminkan suatu anomali sekaligus paradoks, yang menyoroti urgensi masalah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Lulusan perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi segmen tenaga kerja yang sangat produktif, justru sangat rentan terhadap pengangguran. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat, yang masih sangat didominasi oleh sektor manufaktur padat karya, yang sebagian besar mempekerjakan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah.

Di sisi lain, lulusan perguruan tinggi cenderung memiliki ekspektasi gaji yang lebih tinggi (*reservation wage*) dan mencari pekerjaan di bidang jasa *freelance* atau manajerial, yang pertumbuhannya belum cukup besar untuk menyerap seluruh lulusan perguruan tinggi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kualifikasi dan ekspektasi, yang memaksa banyak lulusan perguruan tinggi untuk menunda masuk ke dunia kerja (*wait unemployment*), bekerja di bidang yang tidak terkait dengan keahlian mereka, atau bahkan menganggur sama sekali (Wulandari & Woyanti, 2023).

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur di Jawa Barat sangat erat kaitannya dengan kinerja makroekonomi wilayah tersebut. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi lapangan kerja adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Secara teori, pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Namun, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat perlu diteliti lebih mendalam. Perlu dievaluasi apakah pertumbuhan ini mampu menyerap tenaga kerja secara besar-besaran atau justru merupakan pertumbuhan tanpa lapangan kerja, terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Dinamika kinerja ekonomi ditampilkan dalam grafik berikut.



Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

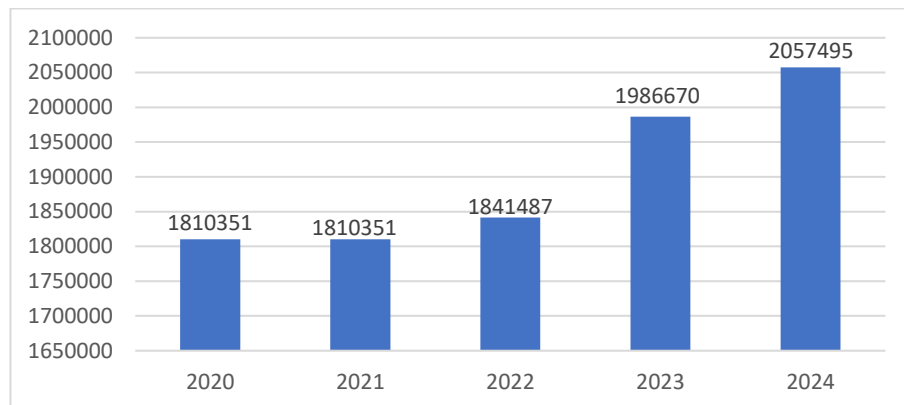
Berdasarkan data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020-2024. Puncak pertumbuhan ekonomi pada periode ini tercapai pada tahun 2022, ketika ekonomi tumbuh sebesar 5,45%. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan ekonomi melambat sedikit namun tetap solid dan stabil, masing-masing sekitar 5% dan 4,95% (Badan Pusat Statistik, 2024)

Grafik Gambar 1.3 menggambarkan fenomena “*Jobless Growth*” pertumbuhan yang tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup. Meskipun perekonomian Jawa Barat mengalami pemulihan yang kuat pasca pandemi, pertumbuhan ini tidak diiringi oleh penurunan tingkat pengangguran yang sebanding di kalangan lulusan perguruan tinggi. Masalahnya terletak pada sifat

pertumbuhan itu sendiri, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor non-dagang atau sektor jasa yang sangat terspesialisasi seringkali sulit diakses oleh lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja, yang berarti bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata ke seluruh segmen angkatan kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat belum memberi kesempatan yang adil kepada tenaga kerja berpendidikan tinggi. Dan ini sesuai dengan teori Okun's Law (1962), yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi biasanya berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran. Tapi di Jawa Barat, hubungan ini terasa tidak kuat karena pertumbuhan ekonomi lebih bergantung pada sektor yang membutuhkan tenaga kerja banyak, tetapi berproduksi sedikit.

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum juga mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja yang berpendidikan tinggi. Upah minimum merupakan harga tenaga kerja. Bagi pencari kerja, upah yang lebih tinggi menjadi insentif untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Bagi perusahaan, kenaikan upah berarti peningkatan biaya produksi. Di Jawa Barat, tren kenaikan upah minimum sering menjadi hambatan dalam perekrutan lulusan baru. Kelompok ini umumnya tidak memiliki pengalaman kerja, tetapi memiliki ekspektasi upah yang relatif tinggi atau upah cadangan. Perkembangan kebijakan upah minimum ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 1.5 Upah Minimum Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

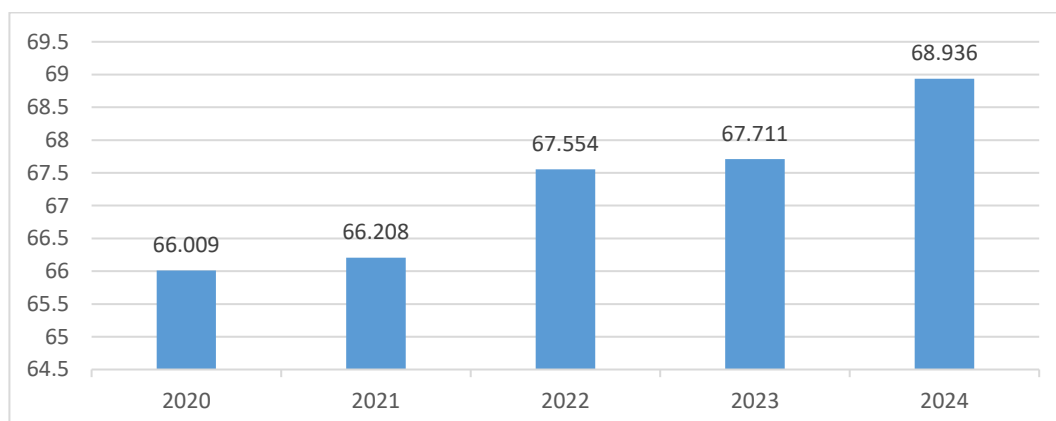
Beralih ke determinan harga tenaga kerja, data kebijakan upah di Jawa Barat menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun selama periode pengamatan 2020-2024. Meskipun perekonomian sempat mengalami kontraksi akibat pandemi pada awal periode, kebijakan upah tetap mengalami peningkatan untuk menjaga daya beli pekerja. Seperti pada tahun 2024, upah minimum provinsi Jawa Barat tercatat mengalami kenaikan sekitar 3,57% dari tahun sebelumnya. Kenaikan nominal yang konsisten ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dengan kondisi perekonomian regional, namun di sisi lain juga mengubah struktur biaya yang harus ditanggung oleh sektor industri (Badan Pusat Statistik, 2024)

Pada Gambar 1.5 menyoroti dilema kebijakan antara melindungi kesejahteraan pekerja dan daya saing industri. Dari perspektif ekonomi, kenaikan Upah Minimum Daerah (UMK) yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas yang setara dapat menjadi hambatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja. Perusahaan cenderung mengutamakan efisiensi dengan memperketat kriteria perekrutan, atau bahkan

dengan memindahkan investasi mereka ke daerah-daerah yang upahnya lebih rendah. Hal ini memaksa lulusan pendidikan tinggi di Jawa Barat untuk bersaing di pasar kerja yang semakin terbatas, dengan persyaratan pengalaman yang sangat ketat, karena perusahaan ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk upah menghasilkan laba atas investasi tertentu dalam hal produktivitas.

Kenaikan upah ini bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi sekaligus membuat biaya produksi industri meningkat. Perusahaan yang kurang efisien biasanya mengurangi jumlah pekerja atau menunda merekrut karyawan baru, termasuk lulusan sarjana. Penelitian oleh Fatma Shafira N.R. (Ramadhani, 2021) dan (Sinaga & Rozaini, 2023) menunjukkan bahwa kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas bisa menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik.

Masalah pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja, seperti kondisi ekonomi dan tingkat upah, tetapi juga oleh tekanan pada sisi penawaran, yaitu jumlah pekerja (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022). Bonus demografi menyebabkan peningkatan tahunan jumlah lulusan perguruan tinggi di Jawa Barat. Ribuan lulusan memasuki pasar tenaga kerja secara langsung, memperketat persaingan di antara pencari kerja. Jika penciptaan lapangan kerja tidak dapat mengikuti peningkatan jumlah lulusan baru, kelebihan pasokan tenaga kerja akan menyebabkan pengangguran. Perkembangan tekanan di pasar tenaga kerja diilustrasikan dalam data berikut.

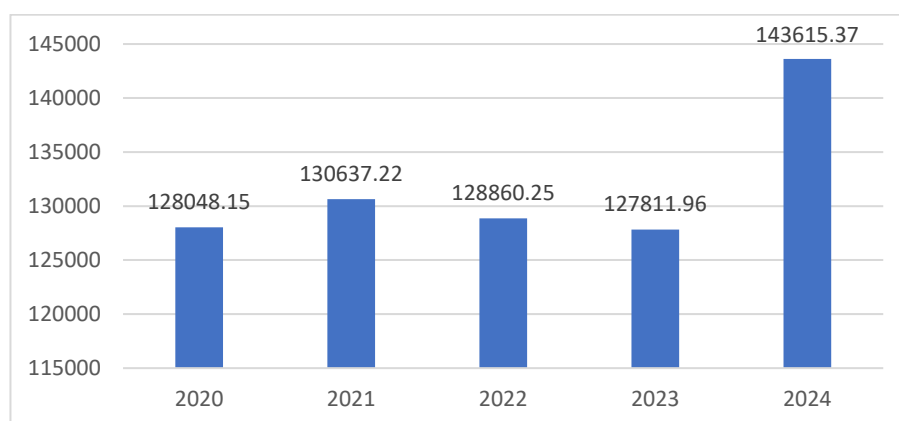


Gambar 1.6 Jumlah Angkatan Kerja Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Open Data Jabar

Dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja pada data di atas menunjukkan perkembangan jumlah angkatan kerja di Jawa Barat periode 2020-2024, sebagaimana terlihat pada grafik yang menggambarkan tren peningkatan yang konsisten dari 66,009% pada tahun 2020 menjadi 68,936% pada tahun 2024 (Open Data Jabar, 2024).

Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Peningkatan ini muncul karena bonus demografi dan tingginya migrasi masuk ke Jawa Barat sebagai kawasan industri. Kenaikan ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan semakin bertambah, termasuk dari kalangan yang memiliki pendidikan tinggi. Namun, jika pertumbuhan peluang kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja, maka terjadilah pengangguran. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan yang sangat ketat antara para pencari kerja, di mana lulusan sarjana harus berkompetisi bukan hanya dengan rekan-rekan sejawatnya, tetapi juga dengan lulusan sekolah menengah yang bersedia menerima upah lebih rendah.

Ketika mekanisme pasar seperti pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah belum mampu menyerap tenaga kerja terampil, peran pemerintah melalui kebijakan fiskal menjadi penting. Pelaksanaan belanja daerah dalam APBD berfungsi sebagai stimulus bagi aktivitas di sektor riil. Belanja modal untuk infrastruktur dan belanja untuk barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat mendorong proyek-proyek yang membutuhkan tenaga kerja profesional dan administratif. Namun, efektivitas belanja daerah di Jawa Barat dalam mengurangi pengangguran di kalangan tenaga kerja terampil perlu diteliti lebih lanjut. Perlu dievaluasi apakah belanja tersebut sudah difokuskan pada aktivitas produktif. Realisasi belanja daerah ditunjukkan di bawah ini.



Gambar 1.7 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Kebijakan fiskal daerah juga memainkan peran penting dalam memengaruhi jumlah pengangguran, dari data oleh DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) ini menunjukkan realisasi belanja daerah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 sampai 2024. Menurut data Badan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, belanja daerah meningkat dari 128,048 triliun pada tahun 2020 menjadi 143,615 triliun pada tahun 2024 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan, 2025). Data pengeluaran pemerintah daerah pada Gambar 1.6 menyoroti masalah “efisiensi alokasi.” Meskipun anggaran pemerintah daerah terus meningkat, masih ada pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam menekan angka pengangguran di kalangan individu berpendidikan tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah mempelajari penyebab pengangguran yang berpendidikan di Indonesia. Namun, kebanyakan penelitian itu memiliki keterbatasan dalam hal wilayah dan waktu. Misalnya, Fatma Shafira N.R. (Ramadhani, 2021) dan penelitian oleh (Anjarwati & Juliprijanto, 2021) hanya menganalisis masa sebelum wabah virus COVID-19, sehingga belum melihat perubahan besar dalam struktur pekerjaan pada periode 2020–2024. Selain itu, kebanyakan studi itu bersifat nasional, sehingga belum meneliti secara khusus kondisi di Jawa Barat yang memiliki ciri ekonomi dan sosial berbeda.

Dilihat dari variabelnya, penelitian sebelumnya biasanya hanya memasukkan faktor makroekonomi seperti PDRB dan gaji, tanpa memperhatikan faktor keuangan seperti belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pembentukan lapangan kerja.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut yaitu dengan menggabungkan variabel ekonomi (pertumbuhan PDRB, upah), demografi (jumlah tenaga kerja), dan fiskal (belanja daerah) secara bersamaan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel.

Kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada tiga hal utama. Pertama, penggunaan data terbaru dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup masa pandemi dan fase pemulihan ekonomi. Kedua, fokuskan analisis pada Provinsi

Jawa Barat sebagai daerah dengan industri terbesar di Indonesia dan jumlah pengangguran tertinggi. Serta ketiga, penggunaan variabel fiskal daerah yang belum banyak dibahas dalam kaitannya dengan pengangguran terdidik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu pengangguran terdidik khususnya kalangan lulusan perguruan tinggi di Jawa Barat untuk periode 2020 hingga 2024, dengan melibatkan empat variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, angkatan kerja, dan belanja daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi strategis bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan ketenagakerjaan dalam merumuskan program-program efektif untuk mengurangi jumlah pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di Jawa Barat di masa mendatang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Angkatan Kerja dan Belanja Daerah secara parsial terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Angkatan Kerja dan Belanja Daerah secara bersama terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Angkatan Kerja dan Belanja Daerah secara parsial terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di *Kabupaten/Kota* di Jawa Barat tahun 2020-2024?
2. Menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Angkatan Kerja dan Belanja Daerah secara bersama terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020-2024?

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari sisi teori maupun praktis. Adapun kegunaan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur ekonomi pembangunan. Hal baru dalam penelitian ini adalah mengaitkan realisasi belanja daerah secara langsung dengan penyerapan tenaga kerja terdidik khususnya lulusan perguruan tinggi, yang belum banyak diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai apakah stimulus fiskal di daerah basis industri efektif untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas atau hanya terbatas pada penyerapan tenaga kerja berketerampilan rendah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah, Pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi strategis dan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk mengalokasikan belanja daerah agar lebih produktif terutama untuk penyerapan tenaga kerja terdidik di Provinsi Jawa Barat

2. Bagi Akademisi, Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan analisis jumlah pengangguran terdidik. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai jumlah pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Barat.
3. Bagi Penulis, Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan maupun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) serta dapat memperoleh gambaran keilmuan yang bermanfaat bagi peneliti.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian menggunakan data 27 kabupaten/kota periode waktu 2020-2024 di provinsi Jawa Barat.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan dan mulai diterbitkannya SK pembimbing. Adapun rencana jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

[illegible]